

**PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian

Dalam Penyusunan Skripsi Pada

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

ANDINI GUSWARI

4519023026

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul : Peran UN Women Dalam Penanganan
Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa
Pandemi Covid-19 di India

Nama Mahasiswa : Andini Guswari

Nomor Stambuk : 4519023026

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

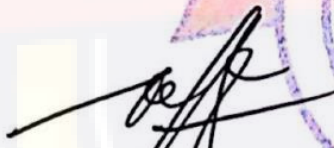
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Makassar, 23 Februari 2023

Menyetujui,


Pembimbing I

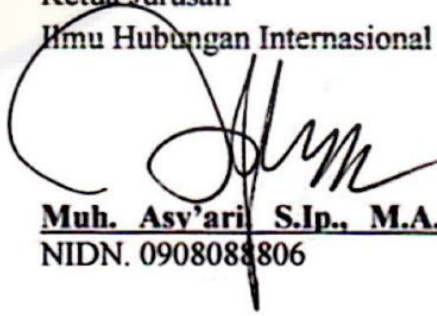
Pembimbing II


Zulkhair Barhan, S.IP., MA
NIDN. 0903048101


Beche BT Mamma, S.IP., MA
NIDN. 0906128203

Mengetahui,


Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
NIDN. 0908083806

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Judul Skripsi **Peran UN Women Dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 di India**

Nama Mahasiswa : **Andini Guswari**
Nomor Stambuk : **4519023026**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

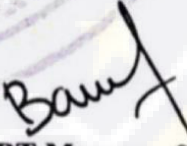
Makassar, 23 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Panitia Ujian:


Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
Ketua


Beche BT Mamma, S. IP., M. A.
Sekretaris

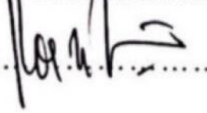
Tim Penguji:

1. Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
2. Beche BT Mamma, S. IP., M. A.
3. Arief Wicaksono, S. IP., M. A.
4. Dr. Rosnani, S. IP., M. A.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Guswari

Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 21 Desember 2002

Nim : 4519023026

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 di India.**

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul **Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 di India.** Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 30 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPESIAL BRU RUPAH 1000 METERAL TEMPEL BC0AKX2 22 659'.

Andini Guswari
NIM. 4519023026

ABSTRAK

Pandemi covid-19 menyebabkan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) di India mengalami tingginya lonjakan kasus. India tergolong sebagai negara dengan budaya patriarkis yang sangat erat dalam masyarakatnya. Sebelum pandemic covid-19 menyerang India, UN Women telah berhasil menurunkan tingkat kekerasan berbasis gender hingga ke titik yang dapat dikatakan cukup memuaskan. Namun pada masa pandemi ini, UN Women dihadapkan oleh permasalahan baru yang dibawa oleh pandemic covid-19. Dengan menurunnya stabilitas perekonomian nasional India, ruang aman yang tadinya terbentuk karena pola kerja masyarakat India hilang dengan adanya kebijakan *lock down* dan juga hilangnya pekerjaan masyarakat India. Bukan hanya masalah perekonomian, perempuan India juga dihadapkan dengan resiko terjangkit wabah covid-19 dengan ada tidak meratanya vaksinasi juga informasi hoax seputar vaksinasi yang ada. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai peranan UN Women dalam isu KBG di India menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini akan menggunakan berbagai berita, jurnal dan juga laporan resmi dari UN Women dan pemerintah India mengenai isu KBG ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer mengenai tiga peranan Organisasi Internasional sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor Independen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian ini menjawab bagaimana peran UN Women berdasarkan konsep yang digunakan.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, UN Women, India, Organisasi Internasional, Peran

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Un Women Dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 Di India” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya peneliti dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Guswari Gafar dan Rosnani Andi Baso S.Pd, M.Pd yang selalu mencurahkan doanya kepada penulis dan mendukung semua aktivitas penulis baik dalam secara materi maupun moral. terimakasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua hebat yang tidak pernah Lelah dan mengeluh untuk menasehati dan mengirimkan uang saat banyak sekali pembayaran kampus sebelum ujian akhir. I love you more than everything
2. Terimakasih untuk my best onty titi yang udah beliin kaca mata untuk peneliti pakai selama penyusunan skripsi ini. Dan untuk semua keluarga yang telah memberikan doa dan berbagai bentuk dukungan lain yang tidak bisa peneliti tuliskan satu persatu.

3. Kepada Andi Takdir Suamir yang telah menemani peneliti melewati berbagai ujian dalam penyusunan skripsi ini, yang menemani peneliti saat bimbingan, menemani peneliti begadang di cafe untuk revisian, menghibur dan menyemangati peneliti.
4. Bapak Zulkhair Burhan S.IP, M.A selaku ketua prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, sekaligus dosen pembimbing 1 peneliti yang memberikan nasehat dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi
5. Ibu Beche BT Mamma, S.IP, M.A selaku pembimbing II peneliti yang dengan sabar menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. bapak Bapak Arief Wicaksono, S.IP, M.A dan Ibu Rosnani S.IP, M.A selaku tim penguji yang telah memberikan saran agar skripsi ini bisa lebih baik lagi
7. Bapak Muh. Asy'ary, S.IP, M.A selaku ketua prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.
4. Seluruh dosen dan staf akademik prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu peneliti dari awal sampai akhir masa perkuliahan peneliti
5. Kepada dua sahabat cantik peneliti Putri Reghina Rusli dan Amanda Nur Aulia yang dari jauh selalu memberi dukungan dan semangat kepada peneliti pada proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada dua sahabat perjuangan Annisa Amril Majid dan Zahra Anindi

Putri yang kebersamai kehidupan perkuliahan ini sampai akhir. Terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang kalian beri baik sampai sekarang ini.

7. Kepada tim Ruang Diskusi kak Karya Gunadharma Prajanusantara, Chantika Aulia Islamiah dan Nurhikma Zainuddin yang kalau lagi pusing kerja skripsi bisa ada jeda karna notifikasi chat grub yang menjadi intermezo yang menyenangkan.
8. Dan Untuk Rahmiyani Auditia Suherman teman sekamar dan teman bagadang sampai jam 2 malam di lokasi KKN untuk ngejar deadline pendaftaran ujian akhir, Seluruh teman-teman angkatan 2019 Hubungan Internasional dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar serta teman-teman BEM Sospol.
9. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, Jazakumullah Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan pahala setimpal, amin

Peneliti telah menyusun skripsi secara baik dan akademis namun peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan juga masukan dari berbagai pihak untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan kepada kita semua.

Makassar, 29 Maret 2023



ANDINI GUSWARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
1. Batasan Masalah.....	4
2. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Jenis dan sumber data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
F. Rencana Sistematika Pembahasan	10
1. Bab I : Pendahuluan	10
2. Bab II : Tinjauan Pustaka	10
3. Bab III : Gambaran Umum	10
4. Bab IV : Pembahasan	10

5. Bab V : Penutup	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Organisasi Internasional.....	13
1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen.....	14
2. Organisasi Internasional sebagai Arena	16
3. Organisasi Internasional sebagai Aktor	18
BAB III GAMBARAN UMUM	23
A. India dan Kekerasan Berbasis Gender	23
1 Patriarki sebagai nilai fundamental masyarakat India.	24
2. Stabilitas keamanan yang kurang.....	26
3. Kekerasan gender di masa pandemic	27
B. UN Women dan Isu Perempuan di India.....	29
1. Sejarah UN Women di India.....	29
2. Program UN Women di India	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Peran UN Women sebagai Arena Diplomasi Dan Advokasi.....	39
B. Peran UN Women sebagai Instrumen di India.....	45
1. Bantuan Jalur Hukum.....	47
2. Konseling Kesehatan.....	49
3. Program Pelatihan Kerja	52
4. Program Peluang Kerja	53
C. Peran UN Women sebagai aktor independen.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) mendirikan sebuah lembaga representasinya yang bekerja dalam memastikan kesetaraan dan pemenuhan hak asasi pada setiap perempuan dan anak perempuan. Lembaga tersebut bernama UN Women (PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) (UN Women n.d). Sesuai dalam perjanjian internasional “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*” dan yang tercantum pada “*UN Declaration on the Elimination of Violence against Women*” tahun 1993, UN Women bekerja sama dengan negara-negara dalam tingkat global untuk memajukan kerangka normatif internasional melalui dukungan yang diberikan kepada pemerintah (UN Women n.d).

Diskriminasi gender merupakan topik utama dari UN Women. Diskriminasi gender diartikan sebagai perlakuan yang membedakan individu akan suatu hak, kesempatan dan kesetaraan berdasarkan gender yang dimiliki (Cedaw, 2011). Salah satu bentuk dari diskriminasi gender yang kerap kali terjadi yaitu kekerasan gender terhadap perempuan.

UN Women sebagai aktor internasional berperan dalam mengadvokasi korban kekerasan gender dengan cara memberikan dukungan dan bantuan di India. Dalam mengatasi kekerasan gender di beberapa negara seperti Ekuador, Mesir, Rwanda dan India UN Women membentuk program *Safe Cities Free of Violence against Women and Girls* (UN Women n.d). Program ini bertujuan

untuk membantu negara dalam mengatasi kekerasan dan mencegah pelecehan seksual, terutama di ruang publik dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Langkah UN Women lainnya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan adalah mengembangkan edukasi kurikulum bersama *World Association of Girl Guides and Scouts* untuk melakukan advokasi terkait jenis - jenis kekerasan yang sering dialami oleh perempuan (UN Women, n.d).

Terkhusus di India, setelah diratifikasi, UN Women bersama pemerintah India, organisasi nasional dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta masyarakat sipil bekerjasama dalam merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan untuk membantu perempuan mendapatkan hak kesetaraan dengan laki-laki (UN Women, n.d.). Bentuk program kerja yang telah UN Women serta pemerintah India melaksanakan seperti, merevisi ulang *program Information Communication Technology* (ICT) pada tahun 2010 untuk pemberdayaan digital perempuan, dialog *strategic partnership* untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan, dan dalam kasus “*Delhi Gang Rape*” (kasus kekerasan seksual dan pembunuhan seorang fisioterapi di New Delhi) UN Women beserta pemerintah India memperbarui amandemen *Indian Penal Code* untuk menegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku kekerasan (Maretta, S., 2018).

Upaya yang telah dilakukan oleh UN Women dan Pemerintah India dalam menekan kasus kekerasan gender di India semakin diberatkan setelah Munculnya

pandemic Covid-19. Dimana data kekerasan gender terhadap perempuan yang dicatat oleh *National Commission of Women* India menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus dalam periode 2019-2021.

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh UN Women, India merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang mengalami tingginya peningkatan kasus *domestic Violence* hingga 25% sejak diberlakukannya *lockdown* (UN Women., 2021). Kebijakan *lockdown* dalam pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat dimana keterbatasan interaksi sosial meningkatkan kecemasan individu dan publik juga mendorong ketegangan dan konflik antara peran dan norma gender.

Sejak India menerapkan kebijakan *lockdown* pada 25 Maret 2020, *National Commission of Women* (NCW) dan Negara telah menerima lebih dari 1.000 panggilan pengaduan dari perempuan dan anak dalam kurung waktu 30 hari (Patel Vibuti., 2020). Saat menjalani karantina mandiri, pria mengalami peningkatan emosi sehingga mendorong mereka menjadi pelaku kekerasan. Jumlah kasus kekerasan gender di India seperti yang tercatat pada periode 2020, Terdapat 15.640 laporan pengaduan yang diterima NCW dalam bentuk 2.283 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (DV) atau pelecehan mahar (*dowry harassment*), 3.604 permohonan perlindungan perempuan yang mendapat ancaman kekerasan dalam rumah tangga, 236 kasus *dowry death* atau kematian akibat perselisihan mahar (Sehraa Loveena., 2020). Kemudian, memasuki tahun 2021 NCW telah mencatat sebanyak 26.513 pengaduan dan

investigasi. Terdapat tiga laporan yang mendominasi catatan NCW tersebut yakni, sebanyak 4.209 laporan kasus pelecehan mahar, 6.049 permohonan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan 8.688 tuntutan perempuan akan hidup yang aman (NCW.2021).

Peningkatan kasus kekerasan gender terhadap perempuan di tengah pandemi mendorong UN Women untuk lebih mempertegas perannya dalam penanganan korban kekerasan gender terhadap perempuan India di tengah Pandemi Covid-19. Maka berdasarkan latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji dan Peran UN Women dalam penanganan kekerasan berbasis gender pada masa pandemi covid-19 di India.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengacu pada peran UN Women dalam penanganan kekerasan berbasis gender pada masa pandemi Covid-19 di India dalam kurung waktu tahun 2020-2021.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran UN Women dalam penanganan kekerasan berbasis gender pada masa pandemi Covid-19 di India?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam penanganan kekerasan berbasis gender di India selama pandemi covid-19 dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian yaitu: pertama, menjadi salah satu syarat bagi penulis agar mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa. Kedua, penelitian ini akan menjadi sebuah kontribusi literatur dalam studi Gender mengenai upaya organisasi internasional dan pemerintah negara dalam meretas kasus kekerasan berbasis gender terkhusus pada perempuan. Ketiga, penelitian ini akan memuat implementasi teori-teori hubungan internasional yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi akademisi yang juga akan meneliti peran dari organisasi internasional.

D. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini menggunakan teori Organisasi Internasional yang diajukan oleh Clive Archer. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana UN Women sebagai organisasi internasional menjalankan peran, tujuan dan fungsinya dalam advokasi isu kesetaraan gender terkhusus pada penelitian ini di negara India sebagai instrumen dan aktor dalam dunia internasional.

Beberapa akademisi Hubungan Internasional mencoba untuk memberikan deskripsi dan rasionalisasi dari eksistensi organisasi internasional dalam kerangka hubungan internasional. Mengambil kesimpulan dari karakteristik Organisasi Internasional yang Bennet jelaskan, maka organisasi internasional dapat dideskripsikan sebagai lembaga yang menarik keanggotaan dari setidaknya tiga negara, memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan yang anggotanya disatukan oleh perjanjian formal (Bennet, 1977). Archer menjelaskan lebih lanjut bahwa organisasi internasional dalam lingkup HI memiliki fungsi dan peran yang menjadi pondasi dari eksistensi mereka sebagai bagian dalam sistem internasional. Merujuk pada deskripsi yang Archer jelaskan mengenai peran dan fungsi organisasi internasional, maka penelitian ini akan menggunakan teori Organisasi Internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer.

Peran Organisasi Internasional yang Archer jelaskan adalah, pertama sebagai instrument, dimana organisasi internasional berperan sebagai alat atau instrumen bagi aktor-aktor HI untuk mencapai tujuan yang mereka ingin capai. Konsep ini menjelaskan bahwa Organisasi Internasional digunakan oleh anggota-anggota mereka untuk dapat mencapai tujuan dari kepentingan nasional mereka. Peran OI yang kedua adalah sebagai arena, yang dimaksud arena dikonsepsi ini adalah organisasi internasional menjadi tempat bagi aktor-aktor HI untuk berdiplomasi, mendorong kepentingan nasional mereka secara publik dan mendapatkan keuntungan atas kepentingan nasional mereka. Dan terakhir, sebagai aktor independen dalam dunia internasional yang memiliki

kepentingan dan tujuan mereka masing-masing (Clive Archer, 2001).

Peran ini sangat sulit untuk dilihat sebab aspek otonom dari OI tidak dapat dilihat selama negara-negara anggotanya masih dapat mengatur pengambilan keputusan mereka. Namun hak otonom dari OI dapat terlihat jelas setelah terjadinya berbagai perjanjian dan OI tersebut mulai mengoperasionalkan instrumen hukum mereka, sehingga walaupun tindakan OI dapat bertentangan dengan kepentingan nasional anggotanya, jika mereka bergerak sesuai batasan dari ketetapan perjanjian yang telah disetujui OI saat itu telah berperan sebagai aktor independen dalam tatanan dunia internasional. Penelitian ini akan berfokus pada konsep peran organisasi internasional sebagaimana yang telah dijelaskan Clive Archer.

Konsep diatas akan digunakan untuk menjelaskan bahwa UN Women dalam isu kesetaraan gender yang ada di India berperan sebagai instrumen bagi pemerintah India untuk dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian India yang menjadi poin utama dari isu KBG yang ada di India selama masa pandemic covid-19. Sebagai Organisasi Internasional, UN Women bukan hanya bergerak sebagai instrumen negara dalam mencapai kepentingan nasional mereka, namun juga menjalankan peranannya sebagai media diplomasi dan advokasi dalam isu ini. Maka dari itu, peran UN Women sebagai arena sebagaimana yang dijelaskan oleh Archer adalah mengadvokasi dan memberi ruang diplomasi dalam isu-isu kesetaraan gender bagi negara-negara di dunia khususnya di negara India yang dapat dilihat dari adanya pembentukan program-program edukasi dan konselingnya bagi para penyintas

kekerasan berbasis gender di India melalui kerjasama dari berbagai actor internasional. Dan dalam operasionalisasi program-program diatas, UN Women telah berperan sebagai aktor independen yang melaksanakan program-programnya bersama India demi menurunkan angka KBG di India dengan menggunakan jalur hukum juga kesehatan dan juga menstabilkan perekonomian India melalui penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian India. Paradigma yang ditawarkan dari konsep ini sangat tepat untuk menganalisa bagaimana peranan UN Women dalam menyelesaikan masalah gender di India selama masa pandemi covid-19 untuk menjawab rumusan masalah yang ditawarkan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami masalah sosial berdasarkan penciptaan kerangka ilmiah yang tersusun secara linguistic (John., 2002). Tujuan pendekatan ini adalah memberikan kajian hipotetik untuk menggali dan menemukan makna dalam konteks sesungguhnya, untuk menjelaskan secara kritis fenomena dalam interaksi sosial masyarakat. Kemudian dalam metode kualitatif ini sifatnya induktif, memusatkan perhatian pada prosedur logika untuk menghasilkan hipotesis umum. Dengan metode analisis kualitatif, penulis akan mengkaji, menggambarkan, mencatat dan menganalisis serta menjabarkan bentuk

peran UN Women di India dalam memberi perlindungan korban kekerasan gender selama pandemic Covid-19.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan penelusuran studi pustaka seperti buku dalam bentuk teks maupun elektronik (*e-book*), jurnal, artikel dan juga dokumen-dokumen yang berasal dari sebuah lembaga atau situs resmi sebuah organisasi, serta dari hasil telaah data penelitian sebelumnya yang memuat topik serupa untuk digunakan sebagai sumber informasi dan pendukung penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil evaluasi wawancara narasumber dan telaah pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai jenis data dalam buku teks di perpustakaan, *e-book*, jurnal dan artikel elektronik di internet dan berbagai dokumen maupun laporan di berbagai situs resmi yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yang mana data-datanya menekankan pada data non-matematis yang telah dikumpulkan dari hasil telaah pustaka.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

1. Bab I : Pendahuluan

Bab I ini berisikan pendahuluan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian berupa teknik analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisikan Tinjauan Pustaka yang mencakup Literature Review, Kerangka pemikiran yang terdiri dari teori teori dan konsep yang digunakan penulis yaitu teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer.

3. Bab III : Gambaran Umum

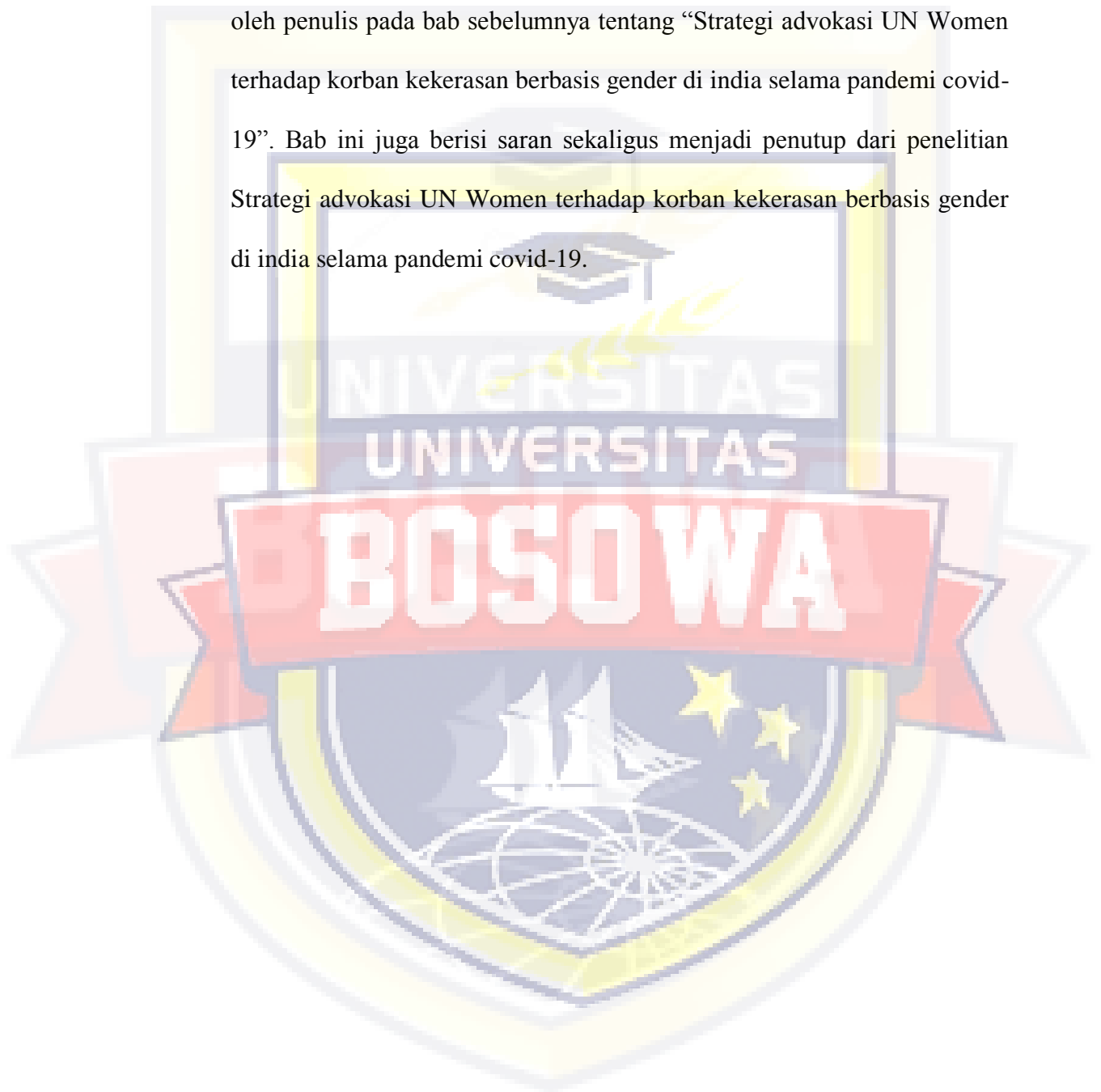
Bab III ini akan mendeskripsikan mengenai kondisi sosial masyarakat India terkhusus pada faktor yang melatar belakangi kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi selama pandemi Covid-19.

4. Bab IV : Pembahasan

Bab IV ini akan berisi pemaparan mengenai topik yang telah diteliti oleh penulis yaitu, Peran UN Women Dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 di India dalam kurun waktu 2020-2021. Penulis akan memaparkan hasil analisis Peran UN Women berdasarkan konsep Organisasi Internasional yang digunakan penulis.

5. Bab V : Penutup

Bab V ini akan berisi tentang kesimpulan dari olahan hasil analisa oleh penulis pada bab sebelumnya tentang “Strategi advokasi UN Women terhadap korban kekerasan berbasis gender di india selama pandemi covid-19”. Bab ini juga berisi saran sekaligus menjadi penutup dari penelitian Strategi advokasi UN Women terhadap korban kekerasan berbasis gender di india selama pandemi covid-19.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, organisasi internasional merupakan suatu lembaga dalam dunia internasional yang menarik keanggotaan dari setidaknya tiga negara, memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan yang anggotanya disatukan oleh perjanjian formal (Clive Archer, 2001). UN Women merupakan organisasi yang dibentuk dibawah korespondensi Organisasi Internasional yang lebih besar yaitu United Nations. Bergerak di bidang advokasi kesetaraan gender, UN Women memiliki jangkauan yang luas untuk mencapai tujuan mereka yaitu terciptanya lingkup internasional yang setara bagi semua gender (UN Web, n. d).

Pada bab ini akan dijelaskan berbagai literatur tentang dan seputar teori yang penelitian ini gunakan sebagai paradigma pembahasan *Organisasi Internasional* oleh Clive Archer yang menjelaskan mengenai peran dan fungsi organisasi internasional dalam dunia internasional. Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran besar dalam dunia internasional, sebagai instrument, arena, dan aktor. Organisasi internasional juga memiliki fungsi dalam dunia internasional yaitu, fungsi sebagai alat artikulasi dan agresi atas kepentingan nasional, pilar untuk menerapkan dan membangun norma internasional, menjadi wadah yang mengumpulkan aktor-aktor internasional dalam satu tujuan, menjadi wadah bagi aktor-aktor HI dalam bersosialisasi, menjadi aktor yurisdiksi dalam dunia internasional, menjadi wadah informasi,

menjadi instrument operasional, dan menjadi sistem global yang mengikat aktor-aktor HI (Clive Archer, 2001).

A. Konsep Organisasi Internasional

Bennet (1977) dalam tulisannya menjelaskan bahwa, karakteristik umum suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan organisasi tetap yang dibentuk untuk menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan
- b. Keanggotaannya secara sukarela dari pihak yang memenuhi syarat
- c. Memiliki instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi
- d. Memiliki badan konsultatif yang global, yang mana representasinya dari berbagai belahan dunia
- e. Memiliki sekretariat tetap untuk menunjang kebutuhan administrasi, penelitian dan informasi mengenai isu yang mereka angkat secara terus menerus

Mengkorelasikan dengan karakteristik yang Bennet tawarkan diatas, Archer menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi suatu organisasi internasional seperti UN Women, maka peneliti HI harus mengkategorikan Organisasi Internasional berdasarkan keanggotaan didalamnya, yang mana Archer menjelaskan lebih lanjut bahwa anggota dari suatu organisasi internasional tidak harus terdiri dari negara saja namun aktor-aktor HI lainnya. Tujuan dari organisasi terkait didirikan, dengan menggarisbawahi

bahwa tujuan dari organisasi internasional mewartakan kepentingan dari anggotanya. Dan juga adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat dipahami kinerjanya oleh dunia internasional (Clive Archer, 2001).

Menggunakan paradigma diatas, maka dapat diasumsikan bahwa India sebagai salah satu aktor dalam dunia internasional dengan sukarela bergabung dengan UN Women. Dengan kata lain, kepentingan dan tujuan antara UN Women dan India dalam permasalahan kesetaraan gender adalah tujuan dan kepentingan bersama. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada konsep peran Organisasi Internasional sebagai aktor dalam dunia internasional serta fungsinya dalam aspek sosialisasi, dan membangun norma kesetaraan gender di dunia internasional dengan mengkoordinasikan kepentingan dan tujuan bersama mereka.

1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen

Archer menjelaskan bahwa gambaran mengenai peranan organisasi internasional yang paling terlihat adalah peranannya sebagai instrumen bagi anggota mereka untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Mengutip perkataan Gunnar Myrdal mengenai instrumentalisasi dari organisasi internasional, bahwa pandangan paling fiktif dari posisi organisasi internasional dalam dunia internasional adalah bagaimana organisasi internasional dipandang lebih tinggi dari anggota yang membentuk organisasi itu sendiri. Sebab ketika suatu organisasi internasional dibentuk, hal ini tidak lain dari terbentuknya kesepakatan yang terbatas dan membatasi negara-negara

untuk melakukan aktivitas multilateral dalam mencapai koordinasi multilateral.

Pandangan Myrdal ini mengindikasikan bahwa organisasi internasional memiliki peranan sebagai alat bagi negara-negara anggotanya. Organisasi internasional non pemerintah dalam posisi instrumen ini dapat direfleksikan dari persyaratan keanggotaannya. Sehingga konsekuensi yang organisasi internasional hadapi adalah akan adanya perkelahian antara anggota-anggotanya untuk dapat mempengaruhi organisasi tersebut menuju kepentingan nasional mereka. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen untuk mencapai kebijakan nasional anggotanya dapat mempengaruhi konstitusi dan perkembangan mereka sebagai organisasi. Sehingga kemungkinan IGO mengembangkan kekuatan pengambilan keputusan mereka sendiri menjadi sebuah gagasan fiktif sebagaimana yang Myrdal jelaskan (Myrdal, 1955).

Pandangan Myrdal ini berfokus pada posisi organisasi internasional sebagai entitas institusional dalam sistem internasional yang mengutamakan negara sebagai aktor utama. Dalam dunia internasional saat ini, globalisasi dan kemajuan teknologi telah menaikkan posisi individu dalam dunia internasional menjadi salah satu aktor internasional (Myrdal, 1955). Sehingga jika kita mengkolaborasikan dua pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peranan organisasi internasional khususnya organisasi non-

negara sebagai instrumen bukan lagi berfokus pada negara melainkan factor dan aktor-aktor lain dalam dunia internasional.

Jika pengaruh utama bukan lagi dari negara, maka dapat dikatakan bahwa organisasi non-negara seperti UN Women merupakan organisasi internasional yang menjadi instrumen bagi individu maupun organisasi lainnya selain UN Women seperti PBB dalam mengadvokasi, dan mendorong terwujudnya pengaplikasian norma internasional yang telah terbentuk dalam sistem internasional saat ini, Hak Asasi Manusia. Sehingga UN Women dapat dikatakan sebagai instrumen kesetaraan gender yang memiliki fungsi dan tugas menormakan kesetaraan gender menjadi norma bersama dalam dunia internasional yang dapat dianut dan dijaga oleh tiap aktor internasional.

Dalam penelitian ini, peran UN Women sebagai instrumen dari kepentingan nasional India dapat terlihat dari berbagai program yang mereka lakukan bersama untuk membangun kembali stabilitas ekonomi di India. Dalam hal ini, UN Women digunakan oleh India untuk menjadi instrumen pendukung pergerakan perempuan dalam dunia kerja dan bisnis yang diharapkan dapat membantu perbaikan stabilitas perekonomian nasional India.

2. Organisasi Internasional sebagai Arena

Archer menjelaskan bahwa sebagai arena, Organisasi Internasional dapat bertindak sebagai forum atau platform dimana berbagai aktivitas

dari negara-negara anggotanya dapat terjadi. Dengan kata lain, organisasi menjadi tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, memperdebatkan masalah dan menemukan solusi untuk masalah mereka baik itu pribadi maupun permasalahan bersama (Archer, 2001).

Organisasi internasional sebagai arena memberi anggota mereka kesempatan untuk mengadvokasi kebijakan, sudut pandang, dan saran mereka dalam forum yang lebih terbuka dan publik dibandingkan dengan apa yang disediakan oleh diplomasi bilateral antar negara (Archer, 2001). Mengutip dari apa yang Stanley Hoffman jelaskan mengenai PBB sebagai arena bagi negara untuk berdiplomasi, Organisasi Internasional sebagai arena dipandang sangat berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing di dalamnya untuk dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya dan juga menjadi bantuan diplomatic untuk kebijakan mereka (Hoffman 1970).

Archer menjelaskan bahwa Peran Organisasi Internasional sebagai arena dapat dilihat melalui berbagai cara,

- Ketika mereka menyelenggarakan pertemuan bagi anggota-anggotanya untuk membuat suatu keputusan
- Ketika mereka melakukan pertemuan AdHoc
- Ketika negara-negara anggotanya melakukan pertemuan informal di sela-sela pertemuan formal yang organisasi adakan. (Archer, 2001)

3. Organisasi Internasional sebagai Aktor

Pada awal munculnya organisasi internasional sebagai salah satu aktor dalam dunia internasional. Perdebatan awal tentang organisasi internasional mengarah pada perdebatan klasik HI dimana akademisi HI melihat organisasi internasional sebagai sistem internasional yang menjadi pengikat negara-negara dalam dunia internasional (Thompson & Snidal, 2011). Namun dengan berkembangnya keilmuan HI, organisasi internasional dapat dilihat dari perannya saat ini sebagai salah satu actor independen HI.

Clive Archer menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu hal yang harus digarisbawahi dari konsep bahwa peran organisasi internasional salah satunya adalah aktor merupakan independensinya dalam pengambilan keputusan serta jalannya program-program yang mereka lakukan. Mengambil pemikiran Karl Deutsch independensi juga dapat diartikan sebagai otonomi, dimana dalam lingkup lingkungannya suatu organisasi yang memiliki sistem untuk mengambil keputusannya sendiri dapat dikatakan otonomis atau independen (Karl Deutsch, 1966).

Arnold Wolfers juga menjelaskan bahwa dalam dunia internasional pada tahun 60-an terdapat beberapa entitas yang bukan negara dan dipandang sebagai aktor dalam sistem internasional yang ada pada saat itu. Aktor-aktor non negara ini dapat dikategorikan sebagai aktor HI dari kemampuan mereka yang dapat beroperasi di panggung

internasional maupun transnasional (Arnold Wolfers, 1962). Klaim ini dapat dirasionalkan jika suatu organisasi internasional tertentu, telah diberikan kehendak untuk bergerak secara otonomi dari pendiri mereka, terlepas dari kapasitas mereka untuk bertindak di kancah internasional dan tercermin dalam institusi mereka (Clive Archer, 2001).

Archer menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat tiga kapasitas dari suatu organisasi internasional yang dapat mengukur independensinya sebagai aktor. *Adanya kemampuan untuk mengontrol tindakan mereka, independensi dalam mengambil keputusan, dan tidak adanya fasilitas peacekeeping dalam isu yang diangkat* (Clive Archer, 2001) Dengan kata lain, peranan UN Women sebagai aktor dalam sistem internasional dapat dirasionalkan dengan adanya penetapan dari PBB tentang pembentukan UN Women sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu mengenai kesetaraan gender yang ada di dunia.

Archer menjelaskan lebih lanjut bahwa peranan Organisasi Internasional tidak dapat dilihat sebagai actor independen selama keputusan yang mereka ambil masih dapat diintervensi oleh actor HI lainnya seperti negara. Namun archer menggarisbawahi bahwa tingkat otonom organisasi internasional berada pada tingkat operasional mereka dimana setelah adanya perjanjian antara semua anggota organisasi internasional, sebagai organisasi, OI akan menjalankan program yang telah disepakati walaupun program yang ada tidak

sesuai dengan kepentingan nasional negara anggota lainnya.

Organisasi Internasional juga memiliki fungsi dan tujuan yang membatasi cakupan kerja mereka juga membatasi negara anggotanya dalam mendorong kepentingan nasional pribadi mereka. Dua fungsi Organisasi Internasional yang sangat terlihat dalam hubungan antara UN Women dan India dalam isu ini adalah,

i. Fungsi Sebagai Norma Internasional

Mengutip Hurrell, maka dapat dikatakan bahwa norma-norma internasional yang negara patuhi hingga memaksa negara untuk bergabung dengan suatu organisasi internasional ataupun sistem internasional pada umumnya terkadang merupakan tindakan normatif negara dalam bertindak. Dengan kata lain sistem yang ada telah memaksa negara untuk mengesampingkan kepentingan nasional mereka untuk kepentingan lain dalam jangka panjang dengan memandang efek samping tindakan mereka terhadap hubungan internasional mereka atas nama norma internasional yang telah disetujui (Hurrell, 1979).

Organisasi internasional telah menyumbangkan banyak norma-norma internasional yang saat ini telah diakui dan dipatuhi oleh masyarakat internasional seperti norma hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak anak, dsb. Pembentukan norma internasional saat ini dinilai sulit dan rumit untuk diproses dengan adanya banyak organisasi internasional baik itu organisasi antar negara maupun non

negara. Mengacu pada piagam PBB, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional dapat mendorong pembentukan norma-norma internasional yang dapat dipatuhi oleh aktor-aktor internasional dengan adanya perjanjian dan kesepakatan akan norma-norma yang harus dipatuhi bersama (Archer, 2001).

Mengacu pada hal diatas, fungsi dari UN Women dalam penerapan dan penekanan atas norma-norma internasional mengenai kesetaraan gender dapat dilihat dari perjanjian CEDAW mengenai program-program untuk mengatasi diskriminasi gender. Serta, fungsi UN Women dalam penegakan norma kesetaraan gender dalam sistem internasional juga dapat tergambarkan dari pendirian UN Women sendiri sebagai upaya PBB untuk mendorong adanya penyelesaian atas permasalahan gender yang ada di seluruh dunia.

ii. Fungsi Sosialisasi dan Advokasi

Tujuan dari sosialisasi dan advokasi pada umumnya adalah menanamkan kesetiaan individu pada sistem, ide, maupun individu dimana setiap individu yang terlibat dapat menerima nilai-nilai dari apa yang ditawarkan kepada mereka. Dengan pertimbangan bahwa ketiadaan dari pemerintahan di dunia internasional, sosialisasi dan advokasi memiliki dampak yang cukup lemah dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara kepada masyarakatnya. Dalam tingkat internasional, sosialisasi dan advokasi bekerja pada dua tingkat, pertama, agen advokasi internasional dapat

bekerja lintas batas negara untuk mempengaruhi masyarakat maupun pemerintah di suatu negara. Kedua, proses sosialisasi dan advokasi dijalankan oleh negara kepada negara yang direpresentasikan oleh perwakilan negara mereka (Archer, 2001)

Archer menjelaskan bahwa fungsi organisasi dalam sosialisasi adalah berkontribusi untuk mendorong anggota-anggotanya bertindak secara kooperatif khususnya untuk tidak merusak norma-norma yang telah mereka sepakati bersama dan Archer menekankan pada pembangunan sikap yang selaras dengan norma dan mampu bertahan lama (Archer, 2001). Dalam penelitian ini, fungsi dari UN Women sebagai organisasi internasional dalam advokasinya mengenai kesetaraan gender dapat dilihat dari kesepakatan pembentukannya oleh PBB. Serta dalam perjanjian CEDAW.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. India dan Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India adalah masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. India menjadi sorotan dunia internasional ketika data yang dipublikasi oleh *National Crime Bureau* menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 228.649 korban di tahun 2011, 242.270 korban di tahun 2012, 309.546 korban di 2013, 337.922 korban di tahun 2014 dan 327.394 korban di 2015 (NCB, 2013).

Menurut Edwards (2010), diskriminasi gender pada dasarnya marginalisasi peran perempuan berdampak di berbagai bidang, terutama dalam representasi suara perempuan dalam politik. Marginalisasi kemudian memberikan stigma buruk kepada perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek superioritas laki-laki karena nilai-nilai laki-laki di India identik dengan adanya sistem patriarki. Padahal, dominasi tidak hanya berarti mental atau pelecehan, tetapi juga serangan fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Pelaku kekerasan berasal dari individu, baik di rumah maupun di tempat umum, serta pelaku kekerasan yang terkait dengan suatu kelompok.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu utama dan karenanya menjadi topik diskusi dalam hubungan internasional. Menurut Konvensi CEDAW, definisi KTP adalah suatu bentuk kekerasan yang dialami perempuan, yang mengacu pada kekerasan yang dilakukan tanpa persetujuan korban melalui

intimidasi psikologis, ancaman, pemaksaan atau pemerkosaan (CEDAW 1998). Penjahat kekerasan datang tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari mitra. Di India, rasa bersalah pemerkosaan lebih dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban dari tindakan tersebut karena pada dasarnya perempuanlah yang bertanya tentang tindakan tersebut, dilihat dari cara berpakaian perempuan. Dalam konteks klan keluarga dalam masyarakat India, preferensi anak laki-laki mengarah pada dominasi, yang pada gilirannya mengarah pada kekerasan terhadap perempuan (Kavita 2015).

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan India disebabkan oleh beberapa factor yang ada dalam lingkup masyarakat India sendiri.

1. Patriarki sebagai nilai fundamental masyarakat India.

Nilai-nilai fundamentalis dalam tatanan masyarakat India sangat bergantung pada sistem patriarki yang menekankan adanya dominasi terhadap perempuan dalam lingkup pekerjaan, dan juga keberadaan kasta di India. Sistem patriarki ini tidak pula bertentangan dengan nilai budaya di India, sehingga hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dan kesenjangan hak dan kewajiban di India sangat sulit dicapai dalam berbagai tingkat masyarakat, baik itu dalam lingkup kerja maupun sosial.

Budaya patriarki di India ditunjukkan dengan adanya pola sosial masyarakat yang masih dibalut oleh sejarah, budaya, kasta, adat dan tradisi hindu India kuno yang menempatkan derajat laki-laki dan perempuan sangatlah jauh berbeda. Konstruksi sosial masyarakat India menganggap bahwa perempuan memiliki karakteristik lemah sehingga partisipasi perempuan dalam

kehidupan sosial ekonomi, politik, Pendidikan dan kehidupan rumah tangga sangat rendah (Tirtoputri, 2022).

Dalam kehidupan rumah tangga, konstruksi sosial ini berusaha mempertahankan dominasi laki-laki untuk mengatur otonomi anggota keluarga lainnya (perempuan). Budaya patriarki yang dianut masyarakat india memberi laki-laki lebih banyak hak daripada perempuan dimana perempuan menundukkan hak pribadinya dalam kehidupan keluarga. Selain itu partisipasi perempuan dalam keluarga dipandang lebih rendah/inferior dari laki-laki. Dalam budaya ini, perempuan dianggap sebagai pencari nafkah sekunder dan terikat oleh tanggung jawab rumah tangga, sedangkan fungsi produksi (mencari uang) ada di tangan laki-laki. Sehingga peluang perempuan untuk mencari pekerjaan atau pendidikan berkurang dan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. Konstruksi sosial yang hidup di tengah masyarakat india ini membuat perempuan rentan akan kekerasan berbasis gender terlebih di tengah masa pandemic Covid-19.

Nilai-nilai konservatif yang ada secara konseptual dan historis tidak hanya melibatkan hubungan kekuasaan asimetris antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga secara negatif mempengaruhi identitas bersama, solidaritas kelompok, ikatan bersama, dan tugas bersama. Di antara nilai-nilai konservatif yang dianggap menyimpang adalah budaya Dowry, yaitu pemberian dari pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya. Mahar dapat berupa uang tunai, barang berharga seperti perhiasan, alat elektronik dan barang lainnya.

Budaya berikutnya adalah adanya *Female Foeticide*, yaitu pengguguran janin perempuan. Budaya kasta Dalit didasarkan pada prinsip dan aturan umum dan melibatkan pembagian orang ke dalam kelompok sosial atau kasta yang ditentukan oleh kelahiran, bersifat turun-temurun dan hierarkis. Kemudian tradisi sati atau pengobatan janda, tradisi itu bersumber dari ajaran Hindu. Kemudian tradisi Sati atau perlakuan terhadap janda, yaitu tradisi yang bersumber dari ajaran Hindu untuk menghormati dewi Sati dan wanita sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepadanya. Suami Meskipun ritual satir ini bersifat sukarela, di beberapa masyarakat ortodoks para janda dipaksa melakukannya, seperti di Rajasthan di India Utara dan juga di beberapa kasta di Bengala Timur, India (Desai 2012).

2. Stabilitas keamanan yang kurang

Alasan lain dari tingginya kasus kekerasan gender terhadap perempuan di India adalah kurangnya stabilitas keamanan di India, terutama terkait dengan terbatasnya jumlah polisi untuk melindungi warga sipil. Pada tahun 2012, polisi yang ditempatkan di New Delhi, ibu kota India, hanya memiliki 84.000 petugas, namun hanya 1/3 dari polisi yang harus melindungi masyarakat sipil dan 3/4 dari polisi harus melindungi elit politik, seperti diplomat. dan birokrat (Mareta, 2017).

Tingginya angka kekerasan di India menunjukkan bahwasannya perlindungan terhadap perempuan tidak menjadi hal yang esensial di negara tersebut. Hal ini dapat dinilai dari beberapa alasan seperti kurangnya penegakan dan keadilan hukum bagi pelaku kejahatan, minimnya upaya

konseling terhadap korban baik secara fisik dan psikologi para korban, serta tingginya skeptisme terhadap stigma negatif masyarakat terhadap perempuan.

Jika didalami, legalitas hukum yang ada di India terlihat lemah dalam praktiknya. Kerap kali sistem hukum india kurang merespon pengaduan yang ada meskipun telah dilaporkan berulang kali. Selain itu, meskipun pengaduan telah diproses hukum secara nyata hal ini belum mampu menekan angka kekerasan yang terjadi (Maholtra, 2013).

Menurut National Crime Records Bureau (2015), 34,6% kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh kerabat atau keluarga, diikuti oleh 25,2% ancaman, 18,1% penculikan perempuan dan 10,6% pada tahun 2015. Ini telah meningkat selama lima tahun terakhir dari 9,4% pada tahun 2011 menjadi 11,1% untuk keseluruhan di tahun 2015. Sensus India, yang diterbitkan pada bulan April 2011, juga menunjukkan penurunan rasio jenis kelamin anak, menyoroti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah India utara yang merupakan wilayah administratif kekuatan ekonomi, penduduk yang melakukan aborsi terhadap perempuan diindikasikan lebih banyak dari wilayah lainnya di India.

3. Kekerasan gender di masa pandemic

Di saat pandemi Covid-19 masuk di India, pemerintah India langsung menerapkan kebijakan lockdown yang dimulai pada 25 maret 2020 sebagai upaya dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Namun nyatanya kebijakan lockdown mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keterbatasan interaksi sosial meningkatkan kecemasan individu dan

publik, kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi dan penurunan kualitas pendidikan. Hal ini kemudian melatarbelakangi adanya peningkatan emosi pria, sehingga mendorong mereka menjadi pelaku kekerasan. Berdasarkan data dari UN Women, kasus kekerasan domestik telah meningkat 25 % sejak lockdown diberlakukan (UN Women, 2021).

Menurut laporan tahunan NCW di tahun 2020, National Crime of Women menerima 23.722 pengaduan di layanan mereka. Laporan yang diterima NCW didominasi akan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. NCW mencatat Uttar merupakan wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi yaitu sebanyak 11.872, kemudian 2.635 di Delhi, 1.266 di Haryana dan 1.188 kasus di Maharashtra (India News, 2021). Dari 23.722 pengaduan yang diterima NCW, 7.708 pengaduan diterima berdasarkan klausul hak untuk hidup bermartabat (India News, 2021).

Selain itu, Hasil Survei Ekonomi di India pada tahun 2020 menunjukkan partisipasi angkatan kerja wanita di India sejak kemunculan pandemi mengalami penurunan hingga 33,1% dan terjadi peningkatan keterlibatan wanita dalam rumah tangga, sebanyak 60% wanita di India terjebak dalam pekerjaan rumah tangga penuh waktu (Das Bhagirath & Ray Poulami, 2020). Keterbatasan kesempatan kerja dan peningkatan beban ganda pada wanita India semakin menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan individualnya.

Selain itu, data UN Women menunjukkan bahwa anak perempuan putus sekolah lebih banyak daripada anak laki-laki selama pandemi, sekitar 65% dari

orang tua yang telah disurvei enggan melanjutkan pendidikan anak perempuan mereka untuk menghemat uang (UN Women, 2021). Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi seluruh generasi perempuan muda.

B. UN Women dan Isu Perempuan di India.

1. Sejarah UN Women di India

UN Women atau *The United Nation Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women* adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh *Nation General Assembly* di tahun 2010 atas dasar resolusi majelis umum 64/268, untuk mengatasi permasalahan hak asasi perempuan dalam pemenuhan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mulai aktif beroperasi di tahun 2011 (UN, 2010).

UN Women di bentuk atas dasar empat elemen penting yakni *Division for the Advancement of Women (DAW)*, *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)*, *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)* dan *United Nation Development Fund for Women (UNIFEM)* (Barnes, 2015).

UN Women merupakan organisasi yang terikat dengan legal personality secara internasional. UN Women dapat membangun relasi seperti korporasi, organisasi, maupun negara lain baik yang memiliki fokus langsung seperti dalam pemberdayaan perempuan maupun fokus

tidak langsung seperti upaya integrasi global secara umum. Seperti salah satu framework UN Women sebagai salah satu badan PBB.

Keberadaan UN Women merupakan bagian dari pengaruh dunia internasional atas adanya ketetapan Majelis Umum PBB mengenai perspektif Women in Development (WID), Deklarasi Beijing, The UN Decade for Women, CEDAW, Deklarasi Mexico, dan Beijing Platform for Action. Perspektif ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1975 dengan menerapkan pentingnya peranan perempuan di dalam proses pembangunan dan perlunya meningkatkan kegiatan untuk memperbaiki status wanita yang diakui secara internasional. WID memiliki tiga agenda yakni persamaan, pembangunan, dan perdamaian.

Di tahun 1975 penetapan WID disetujui oleh World Plan of Action untuk persamaan perempuan dan kontribusi Women in Development bagi pembangunan dan perdamaian. Kemudian pada tahun 1975-1985 dipandang sebagai Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita (The United Nations Decade for Women). Pada dekade tersebut dianggap sebagai dekade penting mengenai pembahasan isu dan ide-ide feminisme yang kemudian menghasilkan dua dokumen yakni Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace dan World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year tahun 1975. Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Kopenhagen tahun 1980 yang membahas tentang laporan setelah adanya Deklarasi Meksiko dan World Plan of Action.

Setelah diselenggarakannya Konferensi Kopenhagen, selanjutnya diadakan Konferensi di Nairobi tahun 1985 guna semakin mempertegas perhatian terhadap isu dan ide feminisme. Konferensi Nairobi sendiri pada dasarnya mengadopsi sebuah dokumen berjudul *The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women*.

Setelah dekade 1975-1985 kemudian diadakan Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang diadakan di Beijing pada tahun 1995 yang menghasilkan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Beijing Platform for Action*) dengan tema "Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian".

Pembentukan UN Women bertujuan untuk mendukung negara anggota PBB dalam memenuhi standar global, seperti memberi bantuan dalam perihal teknis ataupun keuangan serta menjalankan kemitraan yang efisien dengan masyarakat sipil terhadap pemahaman akan tindak kekerasan serta kesetaraan gender (Barnes, 2015). Selain itu UN Women juga bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan tanggung jawab sistem PBB dalam tugas pencapaian kesetaraan dan pemberdayaan perempuan (UN Women, n.d).

UN Women memiliki lima Visi dan Misi yang digunakan dalam pengoprasiaannya untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

1. Mengakhiri kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
2. Melibatkan perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
4. Mengupayakan kesetaraan gender yang nyata bagi perempuan.

Dalam mencapai visi dan misinya, UN Women menaruh perhatian terhadap India sebagai negara yang memiliki angka kasus kekerasan gender yang tinggi. Terlebih melihat hasil survey yang dilakukan Thomson Reuters Foundation mencatat bahwa pada tahun 2018 India menjadi negara yang paling tidak aman bagi Wanita (Thomson, 2019).

Pada dasarnya, keterlibatan UN Women di India telah ada sejak ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 1993. Sejak diperkenalkannya UN Women sebagai salah satu agenda PBB, UN Women telah mendirikan kantor pusatnya di New Delhi, yang berbasis empat wilayah bagian yaitu India, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka. Secara keseluruhan, misi UN Women di India adalah untuk memberdayakan hak-hak perempuan dengan bekerja sama dengan perempuan, laki-laki, aktivis feminis atau gerakan perempuan, pemerintah, organisasi lokal, dan masyarakat sipil dalam menyusun strategi nasional dalam mencapai kesetaraan gender (UN Women, n.d).

2. Program UN Women di India

UN Women berkontribusi pada upaya meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian. Dalam

meninjau keefektifan UN Women dalam prinsip kemanusiaan, terdapat tiga dimensi dalam menganalisis peran organisasi tersebut yakni dimensi kebijakan dan normatif (the policy and normative dimension), dimensi program dan operasional (the programmatic and operational dimension) dan dimensi kapasitas organisasi (the organizational capacity dimension) (Kannabiran 2014).

Dalam dimensi kebijakan dan normatif, UN Women menginisiasi adanya pembangunan yang lebih berorientasi pada perempuan hal ini didasarkan pada Resolusi PBB 1325. Hal normatif dengan melibatkan perempuan adalah sebagai gender responsive melihat fenomena yang dialami India seperti banyaknya kasus kekerasan meskipun India telah meratifikasi konvensi CEDAW tahun 1993. Selanjutnya dalam dimensi dimensi program dan operasional, hal ini dilakukan UN Women salah satunya adalah melalui Development Results Framework (DRF) dan Management Results Frameworks (MRFs). Sementara dalam dimensi kapasitas organisasi, UN Women menggunakan otoritasnya sebagai bagian PBB untuk melakukan improvisasi dan koordinator yang koheren dari dua dimensi sebelumnya yakni dimensi kebijakan dan normatif serta dimensi program dan operasional dalam integrasi dan perlindungan perempuan.

Keberadaan UN Women di India membantu pemerintah untuk merevisi sistem hukum anti kekerasan terhadap perempuan dan merancang UU Hukum Pidana terhadap pelaku kekerasan gender terhadap perempuan (Criminal Law Bill, 2013). UU Hukum Pidana 2013 ini disahkan setelah kasus

Nirbhaya, seorang siswi yang menjadi korban pemerkosaan oleh beberapa orang pemuda pada bulan Desember 2012.

Di dalam UU Hukum Pidana ini terdapat revisi akan ketentuan KUHP Di India, UU Bukti India, dan Hukum acara Pidana. Dengan amandemen ini, beberapa pelanggaran baru diakui dan dimasukkan dalam KUHP India termasuk penyerangan dengan air keras (pasal 326 A dan B), voyeurisme (pasal 354C), menguntit (pasal 354D), mencoba menelanjangi wanita (pasal 354B), pelecehan seksual (pasal 354A), dan penyerangan seksual yang mengakibatkan luka fatal hingga merenggut nyawa korban (Pasal 376A). Hukum Pidana ini dirancang dengan semakin memperketat isi dari ganjaran tindak kejahatan seksual terhadap perempuan. Pasal 375 menjelaskan definisi pemerkosaan dengan lebih luas untuk mencakup tindakan selain penetrasi. Bagian 370 juga diganti dengan bagian 370 dan 370A. Bagian yang diubah mencakup definisi perdagangan manusia dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB, tetapi mengecualikan pekerjaan paksa (Legal Information Institute, 2013).

Selain merevisi undang-undang, UN Women di India juga melaksanakan beberapa program seperti, merevisi ulang program Information Communication Technology (ICT) pada tahun 2010 untuk pemberdayaan digital perempuan, dialog strategic partnership untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan, dan dalam kasus “Delhi Gang Rape” (kasus kekerasan seksual dan pembunuhan seorang fisioterapi di New Delhi) UN Women serta pemerintah India

memperbarui amandemen Indian Penal Code untuk menegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku kekerasan (Maretta, S., 2018).

UN Women bekerja dengan Pemerintah India dan masyarakat sipil untuk menangani pemberdayaan digital perempuan melalui program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi ini pada dasarnya diperkenalkan pada bulan Desember 2004, namun direvisi pada tahun 2010 untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat tingkat menengah untuk mengembangkan kemampuannya dengan bantuan komputer.

Di India, TIK telah dikembangkan di 16 distrik di lima negara bagian India seperti Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa dan Rajasthan, dan perwakilan dan pemimpin perempuan terpilih bekerja sebagai penyedia layanan dan Informasi ditempatkan pada pengguna. UN Women adalah forum penghubung untuk berkolaborasi dengan organisasi lain seperti IT for Change yang berbasis di Karnataka, Kutch Mahila Vikas Sangathan (KMVS) dan Area Networking and Development Initiatives (ANANDI) (Taylor 2012).

Pada tahun 2012, 'pemeriksaan geng Delhi', di mana fisioterapis Jyoti Pandey dilecehkan secara seksual dan dibunuh di New Delhi, menarik perhatian internasional terhadap demonstrasi domestik dan internasional . media daring. Dalam kasus Jyoti Pandey, UN Women dan Pemerintah India, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheila Dixit, akan menerapkan reformasi besar-besaran untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan

perempuan India. Sheila Dixit kemudian menekan Mahkamah Agung India untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Dia juga menunjuk Jagdish Sharan Verma ke Mahkamah Agung India untuk membentuk Komisi Kehakiman, yang kemudian disebut Komisi Kehakiman Verma pada 23 Desember 2012. Memberlakukan KUHP India untuk memungkinkan sistem peradilan yang lebih cepat dan hukuman yang lebih keras untuk diberikan kepada pelanggar. Komite Keadilan Verma membuat rekomendasi undang-undang terkait Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Perdagangan Manusia, Pelecehan Seksual Anak, Pemeriksaan Medis Korban, dan Penguatan Perlindungan Anak untuk Perempuan (CBC News 2013).

Selain merevisi UU Hukum Pidana, UN Women juga bekerja untuk mempromosikan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara India yang setara melalui program, kebijakan, dan undang-undang yang ramah perempuan. UN Women juga mendukung pemberdayaan perempuan di segala lapisan masyarakat dengan fokus pada enam bidang prioritas, yaitu:

1. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

UN Women bergerak dalam menanggapi kasus kekerasan perempuan dan anak dalam berbagai bentuk seperti, kasus kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia dan kekerasan di tempat umum. Selain itu UN Women juga memberi dukungan pencegahan dan pengobatan HIV bagi perempuan dan sebagai bentuk dukungan yang lebih baik terhadap hak-hak janda.

2. Mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di dunia politik dan pengambilan keputusan.

UN Women Bersama pemerintah india membentuk sebuah program yang mempromosikan kepemimpinan politik dan pemerintah perempuan di India dan Asia Selatan. Program ini bertujuan untuk mengedukasi perempuan dalam mengembangkan diri melalui pelatihan kepemimpinan agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan local.

3. Membantu pemerintah india dalam perencanaan dan penganggaran nasional.

UN Women bekerjasama dengan pemerintah india, pihak perbankan india dan badan perencanaan keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran dana mencukupi kebutuhan perempuan di setiap wilayah bagian dan UN Women juga mendorong Kementerian perempuan dan perkembangan anak dalam penyaluran anggaran responsif gender bagi perempuan India.

4. UN Women mendukung peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.

UN Women mendukung perempuan dalam mengklaim hak-haknya atas kepemilikan aset dan properti. UN Women memberikan dorongan bagi perempuan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik pada sektor formal dan informal.

5. UN Women bertekad memberikan perdamaian dan keamanan bagi perempuan.

Sesuai dengan resolusi PBB 1325 pada tahun 2000 mengenai

perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan gender dalam situasi konflik. UN Women memfasilitasi perempuan dengan mengadakan pelatihan kepolisian dan perwira militer wanita untuk menjadi garda terdepan dalam konflik yang ancaman kekerasan seksual bagi perempuan.

6. UN Women mengawasi Migrasi wanita India.

UN Women bekerjasama untuk memperkuat migrasi tenaga kerja perempuan india dengan memastikan para migrasi tercatat secara aman dan legal (UN Women, n. d).

Namun, masuknya Covid-19 di India menjadi tantangan baru bagi UN Women dalam menyusun strategi untuk membentuk program advokasi dengan memberi dukungan nyata bagi perempuan yang berada pada garis ancaman kekerasan seksual. UN Women memberi dukungan advokasi terhadap perempuan dan korban kekerasan gender dalam bentuk bantuan dana, hukum, konseling dan pendidikan serta pelatihan bagi Wanita India. Untuk itu UN Women dan pemerintah India membentuk upaya komunikasi yang bekerja sama dengan masyarakat sipil dan kelompok pemuda India dalam meningkatkan akses informasi yang telah divalidasi untuk menyaring informasi palsu, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang pencegahan dan vaksin virus Covid-19, serta cara mengakses layanan medis, akomodasi darurat, atau layanan perlindungan saat melarikan diri dari ancaman kekerasan dalam rumah (UN Women., 2021).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran UN Women Sebagai Arena Diplomasi Dan Advokasi

Pada tahun 2018, United Nations membuat resolusi yang ditujukan pada agenda 2030 dengan mempertimbangkan semua peluang dan proses pada tahun 2015 dan seterusnya untuk mempercepat dan mencapai implementasi penuh dan efektif. Pertemuan ini dikenal sebagai Deklarasi Beijing dan berisikan landasan aksi yang akan digunakan untuk mencapai hasil konkrit dalam setiap siklus program dan tinjauan, serta mengupayakan realisasi penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk melalui kontribusi perspektif gender untuk realisasi penuh tahun 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai tanggung jawab atas program-program yang akan dilakukan atas dasar inisiasi PBB ini jatuh pada UN Women sebagai organisasi cabang PBB dalam hal kesetaraan gender dalam tingkat operasionalnya (UN, 2018).

Kemudian Pada maret 2020, peringatan dua puluh lima tahun konferensi dunia dan konferensi keempat tentang perempuan dibuka oleh PBB. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. The United Nations Commission on status of women melakukan peninjauan kembali dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing. Pada konferensi ini, 172 Negara diminta untuk menyiapkan laporan nasional setelah melakukan tinjauan. Kelima komisi

regional PBB juga telah melakukan proses tinjauan regional pada penilaian tren dan memetakan langkah ke depan. Laporan komprehensif tersebut disiapkan untuk mendukung kerja Komisi (UN Women,2020).

Menanggapi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, UN Women atas dasar visi kesetaraan yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Platform of Action dari Deklarasi Beijing untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan memelopori aksi kerja sama dengan UNICEF, WHO dan UNHCR dalam program bersama di bawah multi-partner trust fund (MPTF) untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan meningkatkan dan memperkuat intervensi yang sedang berlangsung sebagai bentuk langkah responsif gender di tengah masa pandemi Covid-19 (UN Women, 2021). Dengan adanya pembentukan MPTF, UN Women menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan *platform of action* deklarasi Beijing +25 dengan menginisiasikan berbagai program untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan mainstream gender di dunia. Dalam pelaksanaannya, UN Women memiliki tiga fokus penting yang digunakan sebagai acuan program-program mereka di India.

Dengan tema pertama adalah *governance and policy reform* yang bertujuan sebagai langkah pembentukan fondasi mainstream gender di negara yang dituju. Dengan membentuk dan mengkondisikan pemerintahan disuatu negara untuk lebih memerhatikan permasalahan mengenai diskriminasi dan kekerasan gender, UN Women berharap negara tersebut dapat menyelesaikan permasalahan gender mereka dengan lebih cepat dan menyeluruh. Tema kedua

adalah penanggulangan kekerasan gender, serta usaha peniadaan kekerasan gender. Tema ke tiga adalah *women empowerment*, dimana UN Women melatih dan mengedukasi wanita agar dapat berdiri sebagai individu yang independen baik dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Multi partner trust fund. Merupakan program yang dibangun oleh UN Women sebagai salah satu bentuk inisiasi dari deklarasi Beijing +25 dan juga platform of action untuk menanggulangi permasalahan gender di dunia. Berdasarkan data dari MPTF UN Women hingga tahun 2020 saja, UN Women telah menghimpun dan menggunakan dana dari MPTF untuk 34% pelaksanaan program kesetaraan gender mereka. MPTF menjadi gerbang yang UN Women gunakan untuk mendorong negara-negara maju demi terpenuhinya kesetaraan gender dunia dengan menjadikan MPTF distributor dan arena untuk memberi dan diberikannya bantuan mengenai kesetaraan gender.

Memandang dari konsep archer, MPTF merupakan gerbang yang digunakan UN Women untuk membuka arena diplomasi, dan advokasi bagi India dan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan gender di India. Sebagai instrument utama yang PBB sediakan demi tercapainya kesetaraan gender di dunia, dengan menggunakan platform of action dari deklarasi Beijing, UN Women membuka peluang kerja sama antara India dengan negara lain dan juga MNC di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *stakeholder* yang bergabung untuk memberikan bantuan baik itu dana maupun bantuan tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan gender di India.

Dalam tema utama *public governance and policy reform* UN Women di India, UN Women menjadi media bagi berbagai entitas internasional dalam penyediaan bantuan logistik bagi program-program yang dijalankan. Dari laporan UN Women yang dikeluarkan pada Februari 2023 ini, UN Women telah membantu India mendapatkan bantuan dengan menjadi arena diplomasi bagi aktor-aktor yang terlibat. Sebagai arena, UN Women membuka jalur bantuan dana dari berbagai entitas internasional dengan negara-negara seperti America, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Jerman. Selain negara, bantuan juga datang dari MNC atau *private actor* seperti, Asian Development Bank, Bill & Melissa Foundation, dan Ford Foundation.

Pada focus UN Women selanjutnya, *Ending violence against women*, India mendapatkan bantuan dari Jerman dan Korea Selatan. Sementara dari *private actor*, India mendapat bantuan dari Bill and Melissa Foundation dan Ford Foundation. Disamping itu, untuk menghadapi covid-19, MPTF-Covid Response juga menyediakan bantuan dana dan logistik terpisah yang dikhususkan untuk menangani permasalahan pandemi seperti perawatan pasien Covid-19, hingga pemerataan vaksinasi bagi wanita di India khususnya pada wilayah terpencil di India.

Untuk menstabilkan kondisi masyarakat India, fokus terakhir yang UN Women ambil dari *platform of action* deklarasi Beijing adalah *women empowerment*. Selama berjalannya inisiasi ini, India mendapatkan bantuan dari Uni Eropa. Dari *private actor*, UN Women berhasil menghimpun bantuan

untuk jalannya inisiasi ini di India dengan BHP Billiton Foundation, Linked in, dan juga MNC asal India yaitu Mih Internet India.

Mengkorelasikan dengan penjelasan peran Organisasi Internasional sebagai arena bagi aktor-aktor internasional untuk melakukan diplomasi, diskusi, dan penetapan kebijakan, perjanjian, dan kerjasama mereka dalam lingkup yang spesifik dibawah tujuan bersama, maka pembentukan MPTF ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelaksanaan peran UN Women sebagai arena. Memandang bahwa bantuan internasional dari suatu negara ke negara lain, maupun dari aktor non negara ke negara yang dituju merupakan salah satu bentuk diplomasi, adanya MPTF merupakan bentuk dari langkah UN Women untuk mengadakan arena diplomasi antara negara-negara anggotanya juga berbagai aktor non negara yang memiliki tujuan yang selaras dengan UN Women yaitu kesetaraan gender

Dengan adanya MPTF, negara-negara yang telah disebutkan diatas dapat memberikan bantuan diplomatic mereka sebagai bentuk solidaritas mereka dalam penanganan permasalahan gender di India. Tidak hanya negara, melalui MPTF, aktor-aktor private seperti Ford Foundation dapat memberikan bantuan diplomatic untuk menanggulangi isu kesetaraan gender di India demi tujuan pribadi mereka masing-masing.

Mengaitkan dengan data diatas, hingga tahun 2021 UN Women telah sukses memediasi 11 aktor besar dalam dunia internasional, baik itu negara maupun non negara, untuk memberikan bantuan dana maupun logistic demi kelancaran pelaksanaan program-program kesetaraan gender di India. Masih banyak aktor

lain dalam index partner UN Women yang ikut serta dalam penyediaan bantuan dana dan logistic untuk menyelesaikan isu kesetaraan gender di India, dengan kata lain, UN Women telah menjalankan perannya sebagai arena bagi aktor-aktor internasional dalam berdiplomasi.

Pemerintah India itu sendiri kembali menegaskan dalam konferensi ini bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan akan memberikan kontribusi penting dalam tercapainya semua tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah India juga menyoroti peran Komisi Status Perempuan (CSW) dan mengakui peran penting UN-Women dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan, dan menyambut baik kontribusi yang dibuat oleh masyarakat sipil untuk implementasi *Platform of Action* dan berjanji untuk mempromosikan dan memastikan lingkungan yang aman dan memberi ruang bagi perempuan untuk bertindak sesuai kemampuan mereka (UN Women, 2020).

Resolusi penutup pada konferensi ini adalah sambutan baik dari negara-negara atas kemajuan yang telah dicapai, walaupun mereka juga mengakui bahwa belum ada negara yang sepenuhnya telah mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender untuk semua perempuan dan anak perempuan, dan secara keseluruhan kemajuan tersebut belum cukup cepat atau menyeluruh. Dalam beberapa hal, masih terdapat kemajuan yang tidak merata yang menandakan bahwa masih besarnya kesenjangan yang ada, dan saat pandemic muncul negara-negara mengakui bahwa ini merupakan tantangan baru dan

berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan implementasi secara penuh, efektif dan cepat berdasarkan Deklarasi Beijing dan *Platform of Action*. Para Menteri dan perwakilan dari negara-negara yang hadir berkomitmen untuk mengimplementasikan Deklarasi dan *Platform of Action* Beijing secara penuh, efektif dan dipercepat dengan memperkuat upaya kolektif untuk mencapai kesetaraan gender (UN Women, 2020).

Melalui konferensi ini, PBB menjadikan UN Women sebagai platform atau arena bagi negara-negara termasuk didalamnya India untuk dapat berdiplomasi dan juga mengadvokasikan kebijakan tentang kesetaraan gender agar setiap negara mendapat bantuan serta ruang untuk memperbaiki kesenjangan gender yang ada dimasing-masing negara.

B. Peran UN Women sebagai Instrumen di India

Sejak penerapan kebijakan lockdown terdapat 47 persen wanita yang kehilangan pekerjaan baik itu dengan harapan akan dipanggil kembali maupun secara permanen. Sebagian dari Wanita yang masih bekerja juga mengalami ketimpangan upah kerja di dibandingkan dengan rekan prianya. Perempuan juga mengalami peningkatan beban ganda dan terjebak dalam rumah untuk perawatan anak, suami dan keluarga (UN Women, 2021).

Di tengah pandemic Covid-19 National Commission for Women (NCW) menerima 30,6% peningkatan pengaduan dari perempuan dalam periode 2020-2021, yang mana periode tersebut dimulai dari masuknya pandemic Covid-19 di India. Dalam periode 2020-2021 terdapat 26.513 pengaduan yang diterima oleh NCW dan 57,6% pengaduan yang diterima

termasuk didalamnya kategori kekerasan gender terhadap perempuan. Data pengaduan yang diterima oleh NCW yaitu dalam bentuk kasus kejahatan cyber terhadap perempuan sebanyak 797 kasus, dowry dead sebanyak 327 kasus, pelecehan mahar sebanyak 4209 kasus, penganiayaan terhadap perempuan sebanyak 1802 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 6049 kasus, pemerkosaan sebanyak 1293 kasus, pelecehan seksual sebanyak 573 kasus, pelecehan seksual di tempat kerja sebanyak 216 kasus, dan terdapat 17 kasus aborsi janin perempuan (NCW, 2021).

Sebelum masa pandemic, wanita memiliki ruang aman yaitu setelah laki-laki pergi bekerja, tetapi ketika pandemi berdampak pada hilangnya lapangan kerja, Wanita semakin terjebak dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang dimuat oleh NCW, yang mana dalam periode awal masuknya pandemi pada 2019-2020 terdapat 3369 pengaduan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan pada periode 2020-2021 jumlah pengaduan yang diterima oleh NCW sebanyak 6049 kasus, dalam artian kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi mengalami peningkatan sekitar 79,5% (NCW, 2021).

Melalui data diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan utama dari KBG di India terdapat pada aspek perekonomian. Dengan berlapisnya masalah kekerasan gender di India, UN Women bersama dengan pemerintah India dan organisasi kesetaraan gender local mulai menyusun program-program untuk perempuan di India yang selaras dengan *Platform of Action* yang dikeluarkan Komisi Status Wanita pada konferensi Deklarasi Beijing.

Dalam hal ini, India menjadikan UN Women sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong isu kesetaraan gender yang ada di negaranya dengan bekerja sama dalam program program sebagai berikut,

1. Bantuan Jalur Hukum

Untuk meminimalisir hingga menyelesaikan permasalahan kekerasan gender di India, UN Women bekerjasama dengan pemerintah India untuk membantu korban kekerasan gender, dan mencegah terjadinya kekerasan gender. Langkah pertama yang UN Women lakukan adalah membantu pemerintah India dalam merekonstruksi kelembagaan serta kebijakan mereka agar lebih sesuai dalam pelaksanaan berbagai program kesetaraan gender di India kedepannya.

Untuk mencapai hal tersebut, UN Women melakukan advokasi mengenai agenda feminisme yang didalamnya terdapat edukasi mengenai kesetaraan gender, bagaimana diskriminasi gender itu, serta bagaimana menghadapi isu gender tersebut. UN Women pada tahap ini menjadi instrument bagi India sebab dalam pelaksanaannya, UN Women menjalankan proses advokasi ini dengan menghimpun media nasional, akademisi, serta *private sector* India demi mencapai tujuan yang UN Women serta pemerintah India telah sepakati sejak terbentuknya *platform of action* dari deklarasi Beijing. Dengan mengkondisikan kelembagaan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang ada, UN Women memandang bahwa setelahnya program-program kesetaraan gender yang ada dapat berjalan dengan lebih lancar.

Setelah kelembagaan dan kebijakan pemerintah telah sesuai dengan agenda *mainstream gender*, UN Women membentuk langkah responsive mengenai kekerasan gender melalui program perlindungan hukum dan konseling bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di tengah pandemic Covid-19. Layanan bantuan hukum bagi perempuan tersebut dibuka di beberapa negara bagian seperti Jahangir Puri, New Delhi, Batla House dan Okhla untuk merespon pengaduan kekerasan seksual dan penerimaan upah kerja yang lebih kecil bagi perempuan dibanding upah yang diterima rekan kerja prianya.

Selain itu, pada Juni 2020 UN Women secara teknis juga mendukung pembentukan pusat bantuan hukum oleh perusahaan teh di Assam, Udalguri yang merupakan pusat bantuan hukum pertama di perkebunan teh tersebut. Pusat bantuan hukum yang dibentuk ini berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum kepada perempuan dan informasi tentang berbagai masalah (UN Women, 2020).

Mulai tahun 2020, UN Women bersama dengan Vodafone Idea dan NASSCOM Foundation meluncurkan aplikasi bernama My Ambar. Aplikasi ini berfungsi sebagai portal utama bagi wanita di India untuk mendapatkan bantuan hukum serta edukasi mengenai diskriminasi dan kekerasan gender. (Nasscom Foundation, 2020)

Melihat dari budaya dan bentuk masyarakat India saat ini, UN Women beranggapan bahwa salah satu langkah utama dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender ini adalah adanya advokasi

hukum bagi para wanita di India. Sebab permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan kondisi kelembagaan pemerintah yang masih diwarnai oleh budaya patriarkis. (UN Women,2020)

Sebagai negara yang sangat dekat dengan budaya mereka, India tidak dapat merubah baik itu identitas maupun sikap kelembagaan mereka dengan mudah. Maka dari itu, dapat disimpulkan dengan pandangan Archer bahwa UN Women menjadi instrument bagi India untuk membangun ulang kebijakan dan kelembagaan pemerintah mereka agar lebih mudah dalam menerima pandangan mengenai kesetaraan gender dan dapat menyelesaikan permasalahan gender saat ini. Dengan kata lain, melalui jalur hukum yang sedang dan telah di rekonstruksi oleh UN Women, pemerintah India dapat lebih mudah mengidentifikasi, menanggulangi serta mencegah terjadinya kasus kekerasan gender yang ada di negaranya.

2. Konseling Kesehatan

Norma patriarki di tengah masyarakat india menyulitkan perempuan untuk pergi ke pusat vaksinasi sendirian, dan dengan adanya preferensi untuk anggota keluarga laki-laki yang divaksinasi terlebih dahulu menempatkan perempuan dalam wilayah rentan covid. Keterbatasan akses internet juga membuat adanya peredaran isu hoax di tengah perempuan india tentang dampak buruk vaksinasi pada tingkat kesuburan reproduksi Wanita (UN Women, 2021). Sedangkan jika melihat posisi perempuan dalam masyarakat India, vaksinasi bagi wanita sangat diperlukan mengingat mereka merupakan tameng perlindungan keluarga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pandemik memiliki dampak yang proporsional lebih tinggi pada perempuan karena adanya ketidaksetaraan gender di kehidupan sosial masyarakat. Meningkatnya beban pengasuhan bagi perempuan di tengah pandemic beriringan dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Untuk merespon krisis kesehatan dan kesetaraan gender di India, UN Women bersama pemerintah dan sekutu sektor swasta Saheli Samanvay Kendra (SSK) community di Anganwadi menyediakan layanan kesehatan di daerah pedesaan dan terpinggirkan. Pusat-pusat kesehatan ini menyediakan vaksinasi, makanan gratis, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta mereka memberikan bantuan pada perempuan untuk mengakses program bantuan pemerintah di tengah pandemic Covid-19. UN Women juga memastikan keaktifan dari 700 pusat Krisis Satu Atap di India untuk mendukung perempuan India yang mengalami pelecehan dan membutuhkan tempat berlindung, dan bantuan hukum, serta perhatian medis (UN Women, 2021).

Di samping menjalankan program bantuan hukum UN Women juga menyediakan layanan konseling kesehatan psikologis bagi para korban kekerasan gender serta penyuluhan kesehatan secara luas untuk menjaga kesehatan perempuan dan anak di India. Perempuan dan anak perempuan menghadapi lebih banyak resiko dari dampak pandemi akibat pemerosotan stabilitas ekonomi dan Kesehatan keluarga. Untuk itu, UN Women

bersama SEWA, Saheli Samanvay Kendra (SSK), cequin dan azad foundation, kementerian perempuan dan pengembangan anak India membentuk program kampanye komunikasi kepada perempuan dan anak perempuan di beberapa negara bagian termasuk di New Delhi. Kampanye komunikasi yang diadakan UN Women bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menjangkau informasi yang terverifikasi tentang pencegahan dan vaksinasi penyakit, dan menciptakan kesadaran publik tentang kekerasan berbasis gender. Melalui program ini, UN Women menyediakan layanan hukum, serta bantuan medis termasuk didalamnya layanan psikologis untuk para penyintas kekerasan gender di ruang aman COVID (UN Women, 2021).

Dengan adanya pandemi covid-19, permasalahan gender menjadi semakin banyak dan meresahkan pemerintah India. Vaksinasi bukan hanya permasalahan pemerataan namun juga penyediaan vaksin pada masa pandemic di tahun 2020 hingga awal 2021 masih menjadi masalah global. Dengan adanya bantuan khusus penanganan covid-19 yang MPTF berikan, pemerintah India dapat memvaksinasi banyak wanita dan anak-anak India di wilayah-wilayah terpencil.

Selain dari permasalahan vaksinasi, banyaknya kasus kekerasan gender di India menurunkan factor psikologis wanita-wanita di India baik itu mereka bekerja maupun tidak. Dengan kata lain, produktivitas India akan menurun. UN Women kemudian menjadi instrument bagi wanita di India untuk mendapatkan layanan kesehatan dan konseling

psikologis. Dengan membaiknya kesehatan wanita di India baik itu secara jasmani maupun psikologis, produktivitas India juga akan membaik.

3. Program Pelatihan Kerja

UN Women dan pemerintah India mengambil langkah responsif untuk mengatasi Kekerasan terhadap perempuan terlebih pada persoalan ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang menghantui perempuan india dengan membentuk beberapa program-program yang diupayakan untuk membekali perempuan untuk memiliki stabilitas ekonominya sendiri seperti, program pelatihan dan pendidikan untuk perempuan dengan metode pembelajaran digital dan jarak jauh, untuk membantu mereka mengakses pekerjaan pekerjaan dan usaha kecil. Saheli Samanvay Kendra (SSK) dan SEWA membantu perempuan mengakses pinjaman kecil, dan mendapatkan pelatihan menjahit, serta keterampilan komputer dan pelatihan kecantikan untuk menjadi modal usaha mandiri mereka (UN Women, 2021).

Kemudian, UN Women dan Mygov di bawah kementerian elektronika dan teknologi informasi india bersama-sama meluncurkan tantangan inovasi Amrit Mahotsav Shri Shakti 2021 untuk mendorong teknologi solusi yang dikembangkan oleh pengusaha perempuan guna memfasilitasi keselamatan dan pemberdayaan perempuan (UN Women, n d).

UN Women dan Yayasan Chaitanya yang telah bekerja sama sejak 2019 juga meluncurkan program pendidikan kesempatan kedua dan

pembelajaran kejuruan bagi perempuan india yang kini telah menjangkau lebih dari 50.000 wanita. Program ini juga memfasilitasi perempuan untuk akses ke pekerjaan setelah mereka menyelesaikan pelatihan. Selain itu, karena banyak penolakan akan pengajuan permohonan modal oleh pengusaha kecil, UN Women dan Yayasan Chaitanya juga membantu mereka untuk mendapatkan investasi modal yang lebih besar (UN Women, 2021).

Pemerintah India menggunakan UN Women sebagai instrument untuk mendapatkan bantuan tenaga ahli dalam mengedukasi wanita-wanita di India demi tercapainya stabilitas ekonomi di India. Dengan tujuan yang selaras, stabilitas ekonomi India menjadi salah satu factor utama untuk UN Women capai agar mereka dapat mengurangi kasus kekerasan berbasis gender di India. Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, karena pada saat ini factor utama dari kasus kekerasan gender adalah adanya ketidakstabilan ekonomi, maka dengan tercapainya stabilisasi ekonomi di India, dapat diharapkan menurunkan tingkat kekerasan gender.

4. Program Peluang Kerja

UN Women dengan organisasi lain seperti Azad Foundation juga bekerjasama dengan Sakha Cabs untuk menyediakan kesempatan kerja kepada perempuan sebagai pengemudi taxi online di lima kota besar india yaitu, Delhi, Jaipur, Kolkata, Indore, dan Chennai. Layanan taxi online ini merupakan upaya untuk mendukung perekonomian perempuan sekaligus menyediakan transportasi aman bagi mereka di tengah pandemi, karena

banyak dari perempuan yang merasa tidak aman saat menggunakan transportasi umum terlebih di malam hari jika pengemudinya merupakan seorang pria. Layanan taxi Sakha Cab ini juga memiliki fasilitas perlindungan Kesehatan yang lengkap mengikuti protocol Kesehatan yang diterapkan selama pandemic (UN Women, 2021).

Program ini tidak hanya memberi rasa aman bagi perempuan di India. Namun juga memungkinkan perempuan-perempuan di India untuk bekerja lebih giat bahkan mengambil tambahan jam kerja. Dengan meningkatnya kesempatan kerja perempuan di India dan dengan adanya program konseling hukum yang sebelumnya telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa pemulihan stabilitas perekonomian India selama masa pandemic dapat menjadi salah satu solusi untuk menurunkan tingkat kasus kekerasan gender di India.

Melihat dari program-program diatas, jelas dapat dikatakan bahwa UN Women telah berperan menjadi instrumen dari pemerintah India untuk mencapai tujuannya yaitu mengembalikan stabilitas perekonomian India. Dalam isu yang sama UN Women dan India memiliki tujuan yang searah sehingga pemerintah India dapat menggunakan UN Women sebagai instrumen untuk mendapatkan bantuan tenaga dan dana dari berbagai aktor internasional lainnya untuk dapat menurunkan tekanan perekonomian sehingga tensi dan tingkat kasus kekerasan terkhusus pada wilayah rumah tangga dapat segera berkurang.

Dari program-program yang telah dijelaskan diatas, dapat terlihat bahwa pemerintah India sangat erat bekerja sama dengan UN Women dalam mengatasi berbagai persoalan yang mengarah kepada meningkatnya kekerasan gender serta ancaman kesehatan yang dihadapi perempuan di India. Peran UN Women dalam program-program diatas adalah menjadi instrumen bagi pemerintah India untuk dapat mewujudkan pelaksanaan program-program tersebut.

UN Women menjadi instrumen bagi pemerintah India untuk mendapatkan berbagai bantuan internasional baik itu bantuan dana maupun tenaga untuk dapat menjalankan program-programnya mengenai permasalahan kekerasan gender dan diskriminasi terhadap perempuan di India. Melalui UN Women India mendapatkan bantuan dana dan tenaga dalam program konseling kesehatan dan vaksinasi bagi perempuan di pelosok-pelosok India. India mendapatkan bantuan tenaga hukum yang dikhususkan untuk menolong perempuan-perempuan India dalam mengatasi kekerasan gender maupun dalam mendapatkan hak-hak kerja mereka yang telah terdiskriminasi. Dan India juga mendapatkan bantuan dana dan tenaga dalam rangka mengedukasi perempuan-perempuan di India untuk dapat membangun perekonomian mereka sendiri.

Berbagai capaian dalam program-program diatas dalam jangka waktu yang lama dapat memberikan India stabilisasi ekonomi dengan semakin tingginya tingkat kerja perempuan di dalam negaranya dan juga membantu India dalam menanggulangi permasalahan pandemic yaitu

pemerataan vaksinasi yang mana dapat menurunkan angka kematian di India yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Dengan meningkatnya tingkat kerja perempuan dan menurunnya fatalitas kasus covid di India kedepannya dengan program-program yang ada, India dapat mencapai kepentingan nasionalnya dalam stabilisasi perekonomian nasionalnya bahkan dapat membangun program-program jangka panjang demi memelihara stabilitas perekonomian mereka.

C. Peran UN Women sebagai aktor independen

Peran UN Women sebagai aktor independen dalam isu yang penelitian ini angkat tidak dapat dilihat secara signifikan. Dengan eratnya kerjasama antara UN Women dan pemerintah India, otonomi yang UN Women dapatkan dalam operasionalisasi program-program yang ada dapat dikatakan hampir tidak terlihat. Namun sebagaimana yang telah Archer jelaskan dan telah dirangkum pada bab-bab sebelumnya, sebagai Organisasi Internasional, tingkat otonom UN Women berada pada operasional mereka sebagai suatu organisasi. Kebijakannya dalam program konseling hukum di India dimana UN Women mengadakan Multi-Partner Trust Fund merupakan salah satu bentuk otonomi dari pergerakan UN Women dalam isu kesetaraan gender di India. Dengan kata lain, dengan sedikitnya otonomi yang UN Women miliki, UN Women mengajak berbagai organisasi internasional lainnya untuk berkecimpung di dalam isu kesetaraan gender yang ada di India.

Selain itu, berdasarkan dari deklarasi Beijing dan *platform of action*, UN Women memiliki perannya sendiri yaitu memonitori negara-negara yang

menyetujui konferensi tersebut agar tetap selaras dengan deklarasi Beijing tersebut. Aktifitas monitoring ini merupakan bentuk peran UN Women sebagai aktor independen dalam dunia internasional yang mana kebijakan dan pergerakannya mengenai aktifitas monitorisasi negara-negara tersebut diputuskan dan dijalankan oleh UN Women secara independen dan otonom.

Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas pada bab ini, dapat dikatakan bahwa UN Women telah menjalankan ketiga peran Organisasi Internasional sebagaimana yang Archer telah jelaskan dalam konsep Organisasi Internasionalnya. Sebagai Arena UN Women bersama dengan komisi status wanita PBB telah mengadakan konferensi yang menghasilkan Deklarasi Beijing dan *platform of Action* yang digunakan sebagai landasan program-program kesetaraan gender di India. Menjadi Instrumen dari pemerintah India untuk mendapatkan bantuan dan menjalankan program-program kesetaraan gender di India. Serta menginisiasi berbagai langkah diluar otonomi India menggunakan otonomi UN Women sendiri sebagai aktor independen di dunia internasional demi kelancaran jalanya program-program tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India hingga saat ini belum dapat di akhiri. Terlebih disaat pandemic Covid-19 hadir di tengah masyarakat patriarki India, UN Women sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menghadapi tantangan baru. Bagi UN Women naiknya tingkat kasus kekerasan gender terhadap perempuan merupakan salah satu dampak terburuk dari adanya pandemi. Oleh karena itu tingginya lonjakan kasus kekerasan yang ada menjadi patokan bagi UN Women dalam menginisiasikan program-programnya.

UN Women di India telah berkontribusi dalam penanganan kasus kekerasan gender terhadap perempuan sesuai dengan visi misinya. Dengan menggunakan konsep Organisasi Internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer, penelitian ini telah menjawab peranan UN Women dalam penanggulangan masalah kekerasan gender tersebut. UN Women telah menjadi arena bagi India untuk mendiplomasikan kebijakannya serta mengadvokasi isu tentang perlindungan dan kesetaraan gender bagi perempuan agar setiap negara mendapat bantuan serta ruang untuk memperbaiki kesenjangan gender yang ada. Perwujudan dari peran ini adalah terbentuknya Deklarasi Beijing dan *platform of action* yang kemudian melandasi banyak program-program kesetaraan gender di dunia. Peran setelahnya yang UN Women telah capai adalah perannya sebagai Intrumen,

yang mana dapat dilihat dari adanya pembentukan program-program yang pada capaiannya telah memberikan dampak positif pada perekonomian perempuan di India dan membantu pemerintah india untuk mencapai kepentingan perekonomian nasional mereka sekaligus mendapatkan bantuan vaksinasi guna menjaga kesehatan perempuan-perempuan di India. Selain itu kedua peran tersebut, UN Women sebagai aktor independent dinilai telah cukup berhasil menjalankan program-programnya secara operasional dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban kekerasan gender dan perempuan di india sesuai lingkup otonom yang UN Women miliki.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap keberhasilan UN Women dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di India pada masa pandemic Covid-19, pada bagian ini peneliti merekomendasikan dan memberi saran kepada peneliti selanjutnya untuk melihat lebih kelanjutan peran UN Women dalam menangani kasus kekerasan gender terhadap perempuan hingga berakhirnya pandemic serta meneliti lebih lanjut mengenai peranan UN Women sebagai aktor independen dalam isu ini secara lebih mendalam dari sudut pandang operasional UN Women dalam isu ini. Dan untuk pemerintah India, para pembuat kebijakan diharapkan menjalankan rencana strategis yang berfokus pada pemenuhan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender untuk perempuan baik di masa pandemic dan hingga berakhirnya pandemi, agar perempuan dan anak perempuan dapat menjalani hidup yang bebas dari segala segala bentuk ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer Clive.(2001). *International Organization*. Third edition. Routledge. London and New York. From Link : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6_9SKuD4AhU--zgGHXFeAFwQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F8888760%2FInternational_Organizations&usg=AOvVaw06tSyfZa_WC89EmIuZDOJ7
- Archer, Clive. (2001). *International Organization* Third Edition. London:Routledge.
- BBC. (2022). Rising crimes against Indian women in five charts. Dari Link : <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>
- Bennet, A. Leroy. (1995). *International Organization : Principles and issues*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. From Link : <https://archive.org/details/internationalorg0000benn>
- Copley, A., Decker, A., Delavelle, F., Goldstein, M., O'Sullivan, M., & Papineni, S. (2020). COVID-19 pandemic through a gender lens. Dari Link : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34016>
- K. Barnes, (2015). *The Evolution and Implementation of United Nation Security Council Resoulution 1325 : An Overvie*. New York : Routlegge.
- Legal Information Law, (2013). *The Criminal Law (Amendment) Act 2013*. Diakses pada 05 Januari 2023, dari Link : [https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/the_criminal_law_\(amendment\)_act_2013](https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/the_criminal_law_(amendment)_act_2013)
- Mareta Sabilina. (2017). Peran Un Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. Dari link : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEi47WuJT4AhVNTGwGHc_bAVYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.unair.ac.id%2F68016%2F&usg=AOvVaw0P-kxZuYgSqKUeFXfS109v
- Mittal, S., & Singh, T. (2020). Gender-based violence during COVID-19 pandemic: a mini-review. *Frontiers in global women's health*, 4. Dari Link : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.00004/full?utm_source=CAL+Newsletter&utm_campaign=345c81cfbd-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_14_10_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1be789435a-345c81cfbd-

- My Gov. (2021). Amrit Mahotsav Shri Shakti Challenge 2021. Dari Link : <https://innovateindia.mygov.in/amrit-mahotsav-shri-shakti-challenge-2021/>
- NCW. (2021). *Accomplishment And Initiatives Of National Commission For Women 2017-2022*. Dari Link : <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrcWV6KL4AhX863MBHYbpA3EQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Fncw.nic.in%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FNWC20172021.pdf&usg=AOvVaw06NIS4UjBMbyEuUV516t7b>
- Patel, V. (2020). Gender Differential Impact of COVID-19 on the Urban India. *Mr. Ranjit S. Chavan*, 1. Dari Link : https://www.aiilsg.org/pdf/RCUES_AILSG_Mumbai_The%20Urban%20World_October-December,%202020.pdf#page=8
- Roy, A. S., Sen, N., & Bagchi, S. S. (2021). Gender-Based violence in India in Covid-19 lockdown. *Journal of Comparative Literature and Aesthetics*, 44(1), 41-55. Dari Link : http://jcla.in/wp-content/uploads/2021/01/JCLA-44.1-Spring-2021_Anusua-Nandini-Subrata.pdf
- Sinambela, Lijian. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi aksara. Dari link : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0t_L6t7D4AhVRSmwGHbvgBd8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fopac.perpusnas.go.id%2FDetailOpac.aspx%3Fid%3D555844&usg=AOvVaw221rujbK1km-FzeTK1A8sf
- Singh, S., & Bhattacharyya, R. (2020). A review of domestic violence against women in India during lockdown. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Dari Link : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720489
- Sulaeman, K. M., & Salsabila, F. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme. *Jurnal Sentris*, 1(2), 159-172. Dari Link : <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/4283>
- The Hindu. Domestic violence complaints at a 10-year high during covid-19 lockdown. From : <https://www.thehindu.com/data/data-domestic-violence-complaints-at-a-10-year-high-during-covid-19-lockdown/article31885001.ece>

Thompson Alexander & Snidal Duncan. (2011). International Organization: Institutions and Order in World Politics. *Production of Legal Rule*.

Tirtoputri, D. (2022). Pandemi COVID-19 Dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender Di India. *Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6* (No 1) . Halaman 1846-1852. Dari Link : <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3228>

Tirtoputri, D. (2022). Pandemi COVID-19 Dan Peningkatan Kasus Kekerasan Gender Di India. *Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6* (No 1) . Halaman 1846-1852. Dari Link : <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3228>

UN Human Right, (Oktober, 2014). Sexual and Gender-Based Violence in The Context of Transitional Justice. Diakses pada 05 Januari 2023, dari link : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf

UN Women, (Tanpa Tahun). About UN Women. Diakses pada 06 Januari 2023, Dari Link : <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

UN Women, (Tanpa Tahun). Frequently Asked Question. Diakses pada 06 Januari 2023, Dari Link : <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/faq>

UN, (2010). UN Creates New Structure for Empowerment of Women. United Nation : Press Releaase For Immediate Release. Diakses pada 05 Januari 2023, dari link : <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Media/Stories/en/UNWomenPressRelease201007021pdf.pdf>

UN, General Essambly (2010). Resolution Adopted By The General Assembly. Di akses pada 06 Januari 2023, Dari Link : <https://undocs.org/en/A/RES/64/289>

United Nation. (1979). Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women, Article 27 (1). Dari Link : <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>

United Nationa General Essambly, (2010). UN Creates New Structure For Empowerment of Women. Di akses pada 06 Januari 2023 , Dari Link <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women>

WAHYUNI, D., Nisyak, H., & Elake, G. L. (2021). *PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). Dari Link : <https://repository.unsri.ac.id/56331/>

Women, U. N. (2017). UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Dari Link : <https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/810>

Women, U. N. (2020). Ending Violence Against Women in The Context of Covid-19. Dari Link : <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/ending-violence-against-women-in-the-context-of-covid-19>

Women, U. N. (2020). The World For Women And Girls Annual Report 2019-2020. Dari Link : <https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/944>

Women, U. N. (2021). From immediate relief to livelihood support, UN Women drives investment and support for women and girls impacted by COVID-19 in India. Dari Link : <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4mKTYtaP4AhWQILcAHbFHA34QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2FIndia%2Fimmediate-relief-livelihood-support-un-women-drives-investment-and-support-women-and&usg=AOvVaw1Ch42mv5RedFK7OUozaVih>

Women, U. N. (2021). In Photos: Women on The Front Lines of Covid-19 in India. Dari Link : <https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2021/8/photo-essay-women-on-the-front-lines-of-covid-19-in-india>

Women, U. N. (2021). Women Innovators Create Solutions To Stem Covid-19 in India. Dari Link : <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-innovators-create-solutions-to-stem-covid-19-in-india>

Women, U. N. (2021). Your questions answered: Women and COVID-19 in India. Dari Link : <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit4OiNtaP4AhVk63MBHd8TB8cQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unwomen.org%2Fen%2Fnews%2Fstories%2F2021%2F7%2Ffaq-women-and-covid-19-in-india&usg=AOvVaw35XIF9jxZPuCTBJPi3Vllq>

Women, U. N. (2022). A Comprehensive Approach To Ending Violence Against Women in Rural Spaces in India. Dari Link : <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-violence-against-women-in-rural-spaces-in-india>

Women, U. N. (n.d.) Asia and The Pacific. Dari Link : <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13545701.2021.1876905>

Youssef Sarah. (2020). Special Issue : GENDER IN CRISIS COVID-19 AND ITS IMPACTS. *In Gender Forum*. Pages 4-5. Dari Link : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4nvq7taP4AhVc6XMBHVQ-BT8QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fgenderforum.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F202007_Gender-in-Crisis-COMplete.pdf&usg=AOvVaw0Nv0EL59wMTgpWW-sJQMK7

